



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

**JAWABAN ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yth. Sdr. Pimpinan rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat Paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi atas Pemandangan Umum terhadap Penghantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang bersifat saran dan koreksi, akan kami tindak lanjuti bersama-sama pada penyusunan anggaran belanja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa yang akan datang. Sedangkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, kami sampaikan jawaban dengan mengelompokkan sesuai permasalahan yang diajukan.

I. CAPAIAN KINERJA

A. Angka Kemiskinan

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan angka kemiskinan dapat kami jelaskan bahwa target angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 11,23% dan realisasi sebesar 11,81% sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan. Belanja yang dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp354,02 Milyar dan realisasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018 sebesar Rp325,62 Milyar, yang tersebar pada OPD berikut: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUP ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Koperasi dan UKM. Sesuai data terbaru dari BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 per bulan September sebanyak 450,25 Ribu. Sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 466,33 Ribu. Sehingga penduduk miskin selama setahun berkurang 16,08 Ribu. Langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan meliputi beberapa aspek pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan/pengeluaran masyarakat.

B. Indeks Gini

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan target indeks gini yang tidak tercapai dan langkah strategis yang akan dilakukan untuk percepatan

penurunan ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah dapat kami jelaskan bahwa permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Pemda DIY seperti halnya daerah lain bukan hanya sekedar pencapaian target angka pertumbuhan ekonomi, namun juga terhadap upaya pencapaian prioritas-prioritas pembangunan ekonomi masyarakat secara lebih luas, termasuk pemerataan distribusinya yang ditunjukkan dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini di DIY menunjukkan trend yang relatif menurun dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2018 Indeks Gini DIY 0,422, turun dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 0,440, meskipun masih lebih rendah daripada Indeks Gini secara nasional yang berada pada nilai 0,384. Data BPS DIY (2019) menunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan proporsi 20% berpengeluaran tinggi, memiliki distribusi pengeluaran dari 50,96% pada 2017 menjadi 49,32% pada 2018. Sedangkan kelompok penduduk dengan proporsi 40% berpengeluaran rendah memiliki distribusi pengeluaran dari 14,85% pada 2017 meningkat menjadi 15,65% pada 2018. Artinya proporsi pengeluaran penduduk berpendapatan tinggi berkurang dibandingkan proporsi pengeluaran penduduk berpendapatan rendah, meskipun distribusi penduduk berpengeluaran tinggi masih cukup dominan.

C. Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait permasalahan ketimpangan infrastruktur dapat kami jelaskan bahwa kami telah

berupaya melakukan penurunan ketimpangan wilayah melalui kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada wilayah yang relatif tertinggal (Kulon Progo dan Gunungkidul) antara lain melalui: pembangunan infrastruktur ekonomi, mendorong persebaran investasi, serta mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Selain itu upaya prioritas yang perlu segera dilakukan adalah fokus penanganan pada 15 Kecamatan prioritas, yang mempertimbangkan analisis jumlah penduduk miskin, IPM rendah, dan prasarana dasar yang lebih membutuhkan.

Indeks ketimpangan antar-kabupaten dan kota di DIY mengalami penurunan dari 0,4662 di tahun 2017 menjadi 0,4641 di tahun 2018, walaupun belum memenuhi target yang sebesar 0,4559. Capaian tahun 2018 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY relatif semakin merata. Proses pembangunan Yogyakarta International Airport di Kulon Progo mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kulon Progo sehingga mampu menurunkan angka ketimpangan di DIY secara keseluruhan.

D. Tingkat Pengangguran

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan tingginya tingkat pengangguran di DIY dapat kami jelaskan bahwa target tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 ditetapkan sebesar 2,78% dan realisasi 3,35% sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan. Tingkat pengangguran di DIY didominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan menengah ke atas. Arah

kebijakan yang ditempuh Pemda DIY untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mendorong sinergi dunia usaha, pendidikan, lembaga pelatihan, dan pemda dalam optimalisasi pemagangan, sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah rencana pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah dan mendorong penumbuhan wirausaha baru.

E. Tema Pembangunan

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Demokrat terkait dengan keterkaitan realisasi APBD dengan tema, aspirasi, dan progres, yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2018 dan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tingkat ketercapaian sasaran dapat kami jelaskan bahwa penyusunan APBD DIY didasarkan pada RKPD yang disusun mengacu pada tema pembangunan daerah (termasuk juga tema prioritas pembangunan nasional) sesuai prioritas sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Parameter yang dipergunakan untuk mengetahui kinerja APBD adalah tingkat ketercapaian sasaran pembangunan (IKU Pemda) dan indikator-indikator turunannya. Tingkat ketercapaian sasaran Pemda DIY tahun 2018 telah dituangkan dalam indikator kinerja utama Pemda sebanyak 14 indikator dan indikator kinerja program Pemda DIY sebanyak 31 indikator. Dari 14 indikator kinerja utama yang ditetapkan sebanyak 10 indikator telah mencapai target lebih dari 100%. Sedangkan 4 indikator tidak mencapai target yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), indeks gini,

persentase angka kemiskinan, dan indeks Williamson. Untuk indikator kinerja program yang ditetapkan sebanyak 31 indikator yang memiliki persentase capaian lebih dari 100% adalah sebanyak 22 indikator.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat kami jelaskan bahwa IPM tahun 2018 ditargetkan sebesar 80,29 dan hanya tercapai 79,59. Meskipun masih tetap di atas angka nasional yaitu sebesar 71,43, capaian IPM* (data sementara) pada tahun 2018 masih di bawah angka target yang sebesar 80,29. Kondisi tersebut antara lain disumbang oleh masih belum meratanya pencapaian nilai IPM di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY.

II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait bagaimana strategi penyelarasan kebijakan pembangunan dan penganggaran antara Pemerintah DIY dengan kabupaten dan kota di wilayah DIY melalui:

1. Penyelarasan tema dan sub tema prioritas pembangunan tahunan,
2. Melalui forum trilateral desk untuk menyepakati prioritas kegiatan,
3. Melalui fasilitasi evaluasi kebijakan penyusunan RKPD,

4. Dalam aspek pengendalian secara triwulanan dilakukan pendampingan monitoring pelaksanaan program/kegiatan,
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota.

III. PENDAPATAN

A. Pajak Daerah

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang adanya problema dilematis berkaitan dengan peningkatan PAD yang bersumber dari PKB, BBNKB, PBBKB, Denda pajak, dan Pendapatan Hibah dari Dealer Otomotif serta Jasa Raharja, Pemerintah Daerah dalam mensikapi problema ini salah satunya dengan menerapkan kebijakan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit. Untuk mengurangi kemacetan di jalan wilayah DIY khususnya aglomerasi perkotaan Yogyakarta, terkait dampak dari kenaikan jumlah kendaraan telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen lalu lintas dengan optimalisasi sistem ATCS,
2. Optimalisasi waktu siklus simpang bersinyal berdasarkan hasil studi kinerja ruas jalan dan simpang yang telah dilakukan,
3. Pembatasan ruang parkir di badan jalan dengan pemberian marka biku-biku pada ruas jalan tertentu, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,
4. Penerapan manajemen lalu lintas di beberapa kawasan strategis perkotaan,

5. Mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus Trans Jogja.

Berkaitan dengan penanganan polusi udara yang berasal dari emisi gas buang, dengan cara perluasan tutupan vegetasi dan sosialisasi penggunaan bahan bakar berkadar oktan tinggi serta mendukung pengurangan penggunaan kendaraan 2 tak. Untuk perhitungan indeks standar pencemaran udara (ISPU) di DIY selama lima tahun terakhir mendapatkan nilai rata-rata 35, dengan rentang nilai 0-50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indeks standar pencemaran udara di DIY tahun 2018 relatif baik.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan realisasi pajak rokok tahun 2017 dan dasar penetapan pajak rokok tersebut dapat kami jelaskan bahwa realisasi Pajak Rokok tahun 2017 adalah sebesar Rp207,19 Milyar sesuai dengan data yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan, sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp202,10 Milyar. Untuk penetapan target pajak rokok dapat kami jelaskan bahwa Pajak Rokok merupakan Pajak Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan target dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk masing masing Provinsi. Pembagian tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang penghitungannya sesuai dengan perhitungan jumlah penduduk sebagai dasar pemberian DAU. Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah hanya menerima bagian yang diberikan Pemerintah Pusat.

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan realisasi retribusi perijinan tertentu yang hanya mencapai Rp384,76 Juta atau 57,62%, hal tersebut disebabkan:

1. Adanya perubahan peraturan penerbitan ijin insidentil bagi angkutan umum dalam trayek yang semula boleh dilakukan oleh perorangan menjadi wajib berbadan hukum,
2. Adanya tenaga kerja asing tidak mengajukan perpanjangan IMTA karena perusahaan sudah mampu melakukan alih keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia,
3. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing mengatur bahwa WNA pemegang saham yang bekerja sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak diwajibkan memiliki izin.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Tarumartani, dapat kami jelaskan bahwa realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Tarumartani sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sebesar

Rp0,00. Hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan penyetoran oleh PT. Tarumartani yang mengalami permasalahan *cash flow* akibat dari belum tertagihnya piutang usaha pada akhir tahun kepada sejumlah agen. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan saat kas diterima, maka penyetoran yang dilakukan tanggal 29 Januari 2019 tersebut disajikan sebagai realisasi Pendapatan Tahun 2019.

Untuk realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUKP Tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan, namun demikian realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp3,34 Milyar mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1,24 Milyar atau 37,24%.

D. Dana Perimbangan/Transfer

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang bagaimana ikhtiar dan langkah Pemda DIY agar ketergantungan APBD pada sumber Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat semakin mengecil adalah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga diharapkan ketergantungan pada Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat semakin kecil.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Pendapatan dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp130,72 milyar dan hanya terealisasi

sebesar Rp88,19 Milyar atau 67,46%. Dapat kami jelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak pusat disajikan sesuai dengan transfer ke Rekening Kas Daerah.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan target DAK non fisik terutama pada BOS yang direncanakan sebesar Rp607,75 Milyar dan hanya terealisasi sebesar Rp578,17 Milyar atau 95,13% dapat kami jelaskan bahwa realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyesuaikan dengan jumlah siswa sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

E. Lain-lain PAD yang Sah

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Pendapatan Denda atas keterlambatan pekerjaan tidak direncanakan akan tetapi realisasinya sebesar Rp438,59 juta dapat kami jelaskan bahwa denda atas keterlambatan pekerjaan diharapkan tidak terjadi dengan asumsi bahwa semua pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa yang telah disepakati dalam kontrak. Mendasarkan hal tersebut maka pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan tidak ditargetkan penerimaan.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan Pengelolaan Bis Trans Jogja tahun 2018 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah realisasi pendapatan Bus Trans Jogja yang diterima oleh Dinas Perhubungan Tahun 2018 sebesar Rp19,33 Milyar yang terdiri dari pendapatan tiket sebesar Rp19,27 Milyar dan pendapatan dari denda pelanggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebesar Rp58,35 Juta. Realisasi pendapatan bis Trans Jogja Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan bis tahun 2017 sebesar Rp18,99 Milyar mengalami kenaikan sebesar Rp304,71 Juta. kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah armada yang dioperasikan. Realisasi 2017 apabila dibandingkan dengan realisasi 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2,39 Milyar dikarenakan mulai maraknya angkutan online (khususnya ojek online) yang ada di Yogyakarta hingga pengalihan jalur akibat penutupan ruas jalan yang dilakukan karena event-event tertentu,
2. Jumlah realisasi BOK Tahun 2018 sebesar Rp82,11 Milyar sehingga total subsidi (*nett subsidy*) adalah Rp62,78 Milyar. Realisasi BOK tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi BOK tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp19,33 Milyar karena adanya tambahan armada pada 17 jalur dengan total armada sebanyak 128 armada mulai Januari sampai Desember 2018.

F. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menjawab pertanyaan Fraksi Persatuan Demokrat tentang faktor yang mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain: mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui Samsat Desa, menambah jenis layanan pembayaran pajak daerah melalui ATM, dan memberikan layanan perpanjangan lima tahunan secara *online*.

IV. BELANJA

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang realisasi Program pelayanan kesehatan pada RS Grhasia sebesar 35,02% yang benar adalah 70,04%. Kesalahan terjadi karena angka anggaran pada ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan terinput double.

A. Belanja Barang Dan Jasa

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1,29 Trilyun (89,29%) sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp154,82 Milyar dapat kami jelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp154,82 Milyar merupakan efisiensi dan sisa lelang, pada 35 OPD.

B. Belanja Modal

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan proporsi belanja modal yang masih rendah dan kebijakan penganggaran kedepan dari sisi alokasi dan proporsi APBD dapat kami jelaskan bahwa kami sepakat dengan pendapat Fraksi Partai

Amanat Nasional bahwa kenaikan belanja modal akan menaikkan aset Pemerintah Daerah DIY, akan tetapi prioritas pembangunan diupayakan untuk peningkatan pada kapasitas usaha dan peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat. Untuk kebijakan penganggaran kedepan, kami berupaya tetap mempedomani peraturan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait realisasi Belanja Modal sebesar Rp1,13 Trilyun atau 89,90% sehingga kurang dari anggaran Rp127,27 Milyar. Sisa anggaran tersebut terdiri dari sisa lelang dan sisa anggaran atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tidak bisa dilaksanakan pada BPBD sebesar Rp65,12 Milyar yang dananya baru diterima pada akhir Tahun Anggaran 2018.

C. Belanja Bantuan Sosial

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Belanja Bantuan Sosial yang tidak terealisasi sebesar Rp400 juta merupakan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.

D. Dana Keistimewaan

Menjawab atas kritik Fraksi Partai Gerindra terkait pelaksanaan program Dana Keistimewaan yang belum maksimal dalam mendorong terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-

nilai budaya lokal Yogyakarta dapat kami jelaskan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal Yogyakarta selalu kami lakukan dari tahun ke tahun, antara lain melalui kegiatan-kegiatan pendidikan budaya pada institusi pendidikan formal, pendidikan non formal melalui pawiyatan pamong, dan pendidikan aparatur yang dilaksanakan oleh Pemda DIY.

Alokasi program kegiatan Dana Keistimewaan dilakukan melalui lima urusan istimewa yang bermuara pada kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Program-program Dana Keistimewaan yang diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai budaya local secara berkelanjutan dalam rangka merevitalisasi aspek dan nilai kebudayaan.

V. SILPA

Menjawab atas pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp471,79 Milyar terdiri dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp49,63 Milyar, efisiensi dan sisa lelang sebesar Rp419,20 Milyar, serta pelampauan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,95 Milyar. Kenaikan SILPA antara lain karena adanya sisa dana tunjangan profesi guru sebesar Rp38,58 Milyar, penerimaan hibah pada akhir tahun anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp65,12 Milyar, dan sisa dana keistimewaan sebesar

Rp37,22 Miliar. SiLPA tahun berjalan merupakan salah satu sumber pendanaan belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Menanggapi pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang adanya sisa anggaran yang mengakibatkan terjadinya surplus, dapat kami jelaskan bahwa sisa anggaran berasal dari sisa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta efisiensi dan sisa lelang atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Namun demikian Kami sepakat bahwa dalam penyusunan anggaran belanja daerah harus memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VI. PENGELOLAAN BUMD

Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan BUKP harus didorong agar dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang terpercaya dan lebih berdaya guna bagi usaha mikro dapat kami jelaskan bahwa BPKA selaku pembina BUKP telah melakukan upaya upaya pembinaan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Untuk meningkatkan peran serta BUKP dalam pengembangan usaha mikro didukung dengan penyaluran dana bergulir dari pemerintah daerah.

VII. INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dapat kami jelaskan bahwa total dana bergulir yang beredar dimasyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10,69 Milyar yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar Rp535 Juta, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp1,73 Milyar, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp6,29 Milyar, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp133,5 Juta dan BUKP sebesar Rp2 Milyar. Dana bergulir diberikan dengan suku bunga 1 - 3 % dengan jangka waktu perguliran selama 3 tahun.

VIII. PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT

Menjawab pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Golongan Karya terkait dengan sisa rekomendasi dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa Inspektorat DIY sebagai koordinator percepatan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK secara rutin telah melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh OPD serta secara periodik (semesteran), dan melakukan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. Sisa rekomendasi sebesar 22,19% yang belum ditindaklanjuti tersebut sebagian besar merupakan temuan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, Inspektorat akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar rekomendasi BPK tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

IX. PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait peran swasta dalam pembangunan DIY, telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Untuk mempertajam koordinasi terutama swasta dengan Pemda DIY untuk lebih fokus dalam memprioritaskan pencapaian sasaran pembangunan daerah, juga sudah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 62/TIM/2017 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain itu pada tahun 2018 juga sudah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 152/Kep/2018 tentang Struktur Keanggotaan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masa bakti 2018-2020.

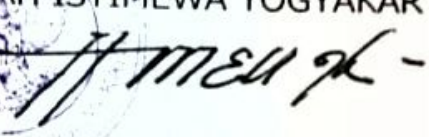
Pimpinan rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan atas pertanyaan dalam Pemandangan Umum yang diajukan oleh Fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dalam penjelasan kami masih dirasa kurang dan belum memuaskan, kami berharap pada forum selanjutnya dapat dilakukan penjelasan lebih lanjut.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik, dalam rangka pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X 